

# Populisme Etno-Religius, Politik Segregasi, dan Rezim Hibrida: Kasus Malaysia

Muhammad Hanan Fahrezi<sup>\*1</sup>, Bowo Sugiarto<sup>2</sup>, Khairu Roojiqien Sobandi<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 53122, Indonesia

\*Corresponding Author: [hananfahrezi@outlook.com](mailto:hananfahrezi@outlook.com)

## ARTICLE INFO

### Article history:

Received 25 March 2024  
Revised 17 November 2024  
Accepted 25 January 2025  
Available 29 January 2025

E-ISSN: 0216-9290

### How to cite:

Fahrezi, M. H. (2025). Populisme Etno-Religius, Politik Segregasi, dan Rezim Hibrida: Kasus Malaysia. POLITEIA: Jurnal Ilmu Politik, 17(1), 56-66.

## ABSTRACT

Malaysia is a Southeast Asian country with unique characteristics. As a multicultural society, democratic existence in Malaysia is based on the fact the country has the instrument for democratic preconditions. However, in recent years, Malaysia has started to experience political turmoil and change with the increase of populism using ethnic and religious discourse in electoral competition. To understand this, our research utilizes qualitative method with document study approach and is analyzed using thematic analysis technique from data collected by documentation. This study focuses on how ethno-religious populism develops in Malaysian hybrid regime through framework of three elements: ethnic composition, political party and governmental configuration, and Islamic religious revivalism. The essential finding of this study is that populism in Malaysia does not merely correspond to the classical populism (small “p” populism) because it revolves more around the ideological competition of political party elites rather than people vs elites power struggle. This ethno-religious populism marked the end of the domination of United Malays National Organization and the beginning of political dynamics between Malay ethnonationalists, conservative Islamists, and progressive-reformists.

**Keyword:** Democracy, Ethno-religious, Hybrid Regime, Malaysia, Populism

## ABSTRAK

Malaysia adalah negara Asia Tenggara dengan ciri khas yang unik. Sebagai masyarakat multikultural, keberadaan demokrasi di Malaysia didasari oleh fakta bahwa negara ini memiliki instrumen prasyarat demokrasi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai mengalami gejolak dan perubahan politik dengan meningkatnya populisme dengan wacana etnis dan agama dalam persaingan elektoral. Untuk memahami ini, penelitian kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi dokumen serta ditelaah dengan teknik analisis tematik dari data yang dihimpun lewat dokumentasi. Studi ini berfokus pada bagaimana populisme etno-religius berkembang di rezim hibrida Malaysia lewat kerangka dengan tiga elemen: komposisi etnis, konfigurasi partai politik dan pemerintahan, dan revivalisme agama Islam. Temuan penting dari studi ini adalah bahwa populisme di Malaysia tidak semata-mata sesuai dengan populisme klasik (populisme dengan “p” kecil), karena ia lebih berputar pada persaingan ideologis elite partai politik daripada perebutan kekuasaan rakyat vs elite. Populisme etno-religius ini menandai akhir dari dominasi United Malays National Organization dan awal dinamika politik antara etnonasionalis Melayu, Islamis konservatif, dan progresif-reformis.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Etno-religius, Malaysia, Populisme, Rezim Hibrida



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.

<http://doi.org/10.26594/register.v6i1.idarticle>

## 1. Pendahuluan

Populisme adalah salah satu tema kajian dalam ilmu politik yang penting untuk memahami relasi antara wacana populis dan proses demokrasi di sebuah negara. Dalam perkembangannya, kajian populisme masih sangat relevan dengan dinamika politik dunia di masa kini. Hadiz & Chryssogelos (2017) mengatakan bahwa pada dasarnya kebangkitan populisme masa kini terjadi karena dua hal, yakni adanya peningkatan ketidakpercayaan terhadap lembaga formal yang menguasai dimensi ekonomi, sosial, dan politik negara serta ketidakpuasan terhadap pemertahanan struktur kelas yang dipelihara oleh sistem kekuasaan. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kajian populisme seperti ini masih terkungkung dalam perspektif populisme Barat. Studi yang mengangkat fenomena populisme dari negara lain, setidaknya di luar penelitian arus utama, masih relatif jarang hingga saat ini. Asia adalah kawasan dengan negara-negara yang memiliki ragam tipologi politik dan pemerintahan yang membuatnya memiliki karakteristik populisme tersendiri. S. J. Lee et al. (2021) mengamati ciri ini dengan melihat corak populisme negara-negara di Asia yang memiliki ragam sub tipe dan umumnya dipahami dari tiga elemen, yakni (1) sejarah demokratisasi, (2) perbedaan susunan sosial, dan (3) konteks sosial-politik yang terkhusus, dari negara tertentu. Oleh karena itu, sifat kekhususan dan keragaman politik Asia menjadi menarik untuk memahami bagaimana populisme bekerja di suatu negara.

Secara khusus, artikel ini akan membahas populisme di Malaysia. Meski kajian populisme di Asia masih berkembang, S. J. Lee et al. (2021) mengatakan bahwa studi populisme di Asia Tenggara mulai mendapatkan perhatian di kepustakaan riset, walau kebanyakan studi masih berfokus pada negara semacam Thailand, Indonesia, dan Filipina, seperti studi yang dilakukan William Case. Maka, fokus terhadap kajian populisme di Malaysia dalam artikel ini akan berguna untuk mengisi kekosongan yang ada dalam riset terkini. Sebagaimana sifat politik negara Asia yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya, Malaysia tidak luput akan ragam karakteristik itu. Malaysia adalah negara monarki konstitusional parlementer dan memiliki pemilihan umum berkala yang menunjukkan eksistensi demokrasi secara institusional dan fungsional. Meski memiliki instrumen demokrasi yang lengkap, Malaysia mengalami masalah kemunduran demokrasi, ditunjukkan dengan meningkatnya penggunaan populisme di persaingan elektoral.

Penelitian-penelitian ilmu politik yang membahas populisme secara umum menyandarkan perspektifnya pada kerangka pikir populisme klasik mengenai perlawanan antara rakyat dan elite. Sebagai contoh, Hera (2017) memberikan gambaran mengenai situasi populisme di Indonesia yang dimanfaatkan oleh politisi populis, utamanya antara Joko Widodo dengan populisme teknokratis yang menawarkan reformasi birokrasi dari elite korup serta Prabowo Subianto yang menonjolkan sikap agresivitas melawan elite asing dan cukong. Perspektif ini juga ditunjukkan oleh Filipina dari populisme Rodrigo Duterte dengan politik *strongman*-nya melalui perlawanan terhadap oligarki dan kebijakan populernya, seperti *Drug War (Magno, 2021)*. Kami memperhatikan bahwa kerangka pikir populisme klasik seperti contoh tersebut, meski hadir di Malaysia, memiliki distingsi dengan populisme di negara Asia Tenggara lain, utamanya karena faktor kesejarahan Malaysia yang kental dengan etnisitas dan agama serta kaitannya dengan sistem politik mereka.

Kajian populisme di Malaysia umumnya masih mendasari argumennya pada perspektif pascakolonial dan historis dengan mengungkit sejarah kolonialisme Inggris di Malaysia. Menurut Munro-Kua (1996), salah satu titik kritis yang melahirkan gejala populisme di Malaysia adalah pembentukan masyarakat komunal untuk memperoleh kedudukan sosial-politik yang tinggi dan melahirkan semangat *Bumiputraisim*. Ia menyebut gejala ini sebagai *authoritarian populism*. Situasi pemerintahan bercorak rezim hibrida dan otoritarianisme yang eksis sejak awal di Malaysia adalah efek dari *Bumiputraisim* ini. *Bumiputraisim* adalah politik penghormatan kaum pribumi Malaysia melalui hak istimewa sosial-politik sebagai upaya untuk memulihkan kedudukan pribumi yang hilang akibat kolonialisme Barat (Munro-Kua, 1996). Gagasan ini diperkuat oleh feodalisme melalui legitimasi kekuasaan raja-raja Melayu. Munro-Kua memandang hal ini sebagai bentuk awal proteksionisme dengan justifikasi etnis dan agama yang kemudian berpengaruh pada tumbuhnya populisme di Malaysia. Sementara itu, Lee (1990) memandang bahwa revivalisme agama menjadi pengaruh meningkatnya nasionalisme etnis di Malaysia. Menurutnya, legislasi represif dan sikap kedisiplinan industrialisasi baru yang menjadikan pemerintah lebih koersif di kehidupan masyarakat, dengan membatasi selisih pendapat terhadap pemerintah, membuat orang-orang Melayu beralih ke Islam sebagai media untuk menyalurkan ketidakpuasan mereka.

Beberapa riset terkini mengkaji populisme di Malaysia dengan mengidentifikasi beberapa elemen, karakteristik, faktor, dan pola yang ada. Yilmaz & Morieson (2022) mengamati fenomena populisme berbasis agama di Malaysia yang sarat akan penggunaan agama sebagai alat kekuasaan politisi populis dan perebutan kekuasaan yang terjadi oleh para politisi untuk merebut simpati Melayu-Muslim. Shukri (2023) dalam risetnya

menyatakan bahwa Malaysia sedang mengalami kebangkitan populisme oleh kelompok etnonasionalis Melayu yang ditandai dengan munculnya populisme Islam dan inovasi autokratis yang menyebabkan gejala kemunduran demokrasi. Walau kebanyakan penelitian seperti ini sepakat bahwa populisme hadir di Malaysia, ada pula yang menawarkan perspektif kontras, seperti Weiss (2020) yang berpendapat bahwa politik Malaysia tidak bersifat, atau juga tidak mengarah ke, populisme sebagaimana dalam riset-riset terkini.

Meskipun terjadi beragam pandangan dalam riset di tema ini, kami berargumen bahwa populisme dan gejala-gejalanya pada hakikatnya memang terjadi di Malaysia. Akan tetapi, kami juga mencermati bahwa riset-riset terkini yang mengkaji populisme di Malaysia pada umumnya hilang sasaran terhadap esensi utama dari kajian populisme, yakni pergumulan antara rakyat dan elite. Walau definisi populisme klasik (*small "p" populism*) ini umumnya berlaku pada konteks negara lain, kami berpendapat bahwa populisme di Malaysia tidak cukup bisa digambarkan dengan definisi tersebut, karena elemen, karakteristik, faktor, dan pola politik negara Malaysia memiliki situasi yang unik/khusus, yang mengharuskannya untuk diperlakukan secara berbeda. Kurangnya kedalaman analisis dan perspektif baru dalam membaca populisme di Malaysia ini meninggalkan *gap* penelitian berupa pengabaian terhadap situasi sosial-politik di Malaysia. Oleh karena itu, kami mencoba untuk memberikan interpretasi lain mengenai populisme di Malaysia, utamanya dengan menggunakan bingkai etnisitas, agama, dan sistem politik Malaysia. Penelitian ini menjadi sangat penting, karena dengan menggunakan lensa yang baru, kita dapat menganalisis dan menginterpretasikan fenomena populisme di Malaysia secara utuh dan tidak parsial.

Dari situ, kami berargumen bahwa kendati populisme wujud di Malaysia, populisme tersebut tidaklah semata-mata menggambarkan *power struggle* antara rakyat dan elite, sebab makna populisme klasik ini sepertinya hilang dalam konteks Malaysia. Hal ini terjadi karena populisme di Malaysia justru dilakukan oleh elite sebagai *appeal to the masses* saja sebab pesan-pesan tersebut umumnya mengalienasi rakyat *out-group*, bahkan sesama rakyat *in-group* dalam kepentingan tertentu, sehingga bentuk populisme ini lebih didasari oleh semangat dan persaingan ideologis antarelite, walau populisme ini pun digunakan sebagai alat. Setelah mendiskusikan populisme, kami akan merelasikannya dengan kemunduran demokrasi. Freedom House (2022) menempatkan Malaysia di kategori "*Partly Free*" dan menyorot runtuhnya koalisi Barisan Nasional (BN) yang berkuasa 1957—2018 dan diwarnai dengan ragam tindakan nondemokratis. Hal ini penting untuk diselidiki agar kita memahami pengaruh populisme terhadap demokrasi Malaysia.

Dari pemaparan ini, pertanyaan utama yang diangkat studi ini adalah bagaimana populisme di Malaysia ini bekerja; seperti apa elemen, karakteristik, faktor, dan pola yang muncul dalam populisme di Malaysia ketika dianalisis dengan konteks sosial-politik Malaysia yang bersifat *sui generis* ini; dan bagaimana interaksi populisme itu dengan demokrasi? Studi kami dalam artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi populisme yang terjadi di Malaysia, khususnya populisme etno-religius dalam *setting* rezim hibrida, melalui kerangka pemikiran tiga elemen pembentuk populisme etno-religius di Malaysia, yaitu komposisi etnis, konfigurasi partai politik dan pemerintahan, dan revivalisme agama Islam. Di bagian terakhir, kami akan mengimplikasikan seperti apa dampak negatif populisme etno-religius terhadap proses demokrasi negara Malaysia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian kami dalam artikel ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan studi dokumen/literatur untuk menganalisis, menyelidiki, dan menginterpretasikan fenomena populisme yang terjadi di Malaysia. Studi dokumen yang memfokuskan kajiannya dengan analisis dan penafsiran sumber-sumber tertulis, sebagaimana menurut Abdussamad (2021) ini, digunakan sebagai dasar penelitian kami untuk menghimpun data dan informasi dari ragam dokumen penelitian dan publikasi, seperti buku, artikel jurnal, *working paper*, prosiding konferensi, dan berita dari sumber tepercaya, yang berhubungan erat dengan tema penelitian kami. Fokus utama kami adalah untuk menelaah tulisan akademik, laporan, dan publikasi yang mendiskusikan topik-topik mengenai populisme, sosial-politik, rezim hibrida, dan demokrasi di Malaysia.

Studi dokumen dalam riset ini memungkinkan kami untuk mengidentifikasi konteks etnisitas, agama, dan sistem politik yang berlaku di Malaysia serta mereinterpretasikan kajian-kajian lampau yang masih memiliki *gap* riset. Dengan demikian, penelitian ini dapat menemukan elemen, karakteristik, faktor, dan pola yang mewarnai perkembangan populisme etno-religius Malaysia serta memberi makna baru yang luput di penelitian terdahulu. Penggunaan pendekatan ini memenuhi kebutuhan kami dalam menganalisis tema penelitian yang sarat akan konteks dan makna, seperti halnya yang dikemukakan oleh Sugiyono (2013) bahwa

studi kepustakaan ini mengambil studi teoretis dan rujukan lain yang berkaitan dengan nilai, norma, dan budaya yang berkembang pada keadaan masyarakat yang hendak dikaji, dalam konteks ini adalah Malaysia.

Data dan informasi dari sumber literatur yang telah dikumpulkan lalu ditelaah dengan teknik analisis tematik yang dikemukakan oleh Braun & Clarke (2006). Sifat dari analisis tematik yang kental akan klasifikasi dan sintesis tematik untuk mengidentifikasi beragam tema ini sesuai dengan karakteristik penelitian kami. Terakhir, metode pengumpulan data riset ini menggunakan dokumentasi. Dari Hardani et al. (2020), metode dokumentasi ini dilakukan dengan pengambilan data sekunder lewat dokumen berupa sumber literatur terkait; yang memenuhi syarat penelitian kami, yakni ilmiah, relevan dengan tema penelitian, dan bisa dipertanggungjawabkan isinya.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Konsep Populisme Etno-Religius

Mudde (2004) memaknai populisme sebagai ideologi yang menganggap bahwa masyarakat terbagi menjadi dua kelompok yang homogen dan berlawanan, yakni “rakyat yang suci” melawan “elite yang korup”, di mana populisme ini menganggap bahwa politik seharusnya diperlakukan sebagai bentuk ungkapan kemauan bersama suatu rakyat. Namun, populisme tidak boleh diposisikan sebagai *thick ideology*, karena ia tidak memiliki kerangka pikir yang baku. Mudde mengemukakan bahwa jantung populisme di masa kini lebih berfokus pada *input* ketimbang *output* demokrasi. Maksudnya, populisme cenderung berorientasi kepada bagaimana pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan yang sesuai dengan kehendak mereka. Mudde menjelaskan bahwa para pendukung dari populisme ini menghendaki terselesaikannya “masalah orang-orang biasa” yang sesuai dengan nilai mereka, dan mengakui bahwa hal seperti ini harus dikawal oleh seorang pemimpin yang luar biasa. Massa dan elite populis menurutnya memiliki kesamaan, yakni enggan untuk diwakili oleh seorang elite asing dengan kebijakan yang tidak mencerminkan kehendak dan kepentingan mereka. Sumber kekuatan populisme menurut Mudde berasal dari pihak yang kebingungan (rakyat) dan janji demokrasi oportunistis dari elite politik.

Dalam konteks Malaysia, praktik populisme yang dilakukan oleh politisi populis umumnya membawa pesan kerakyatan semacam itu dalam balut etnis dan agama yang diperkawinkan. Kombinasi antara etnis dan agama dalam struktur politik Malaysia ini dapat diistilahkan sebagai etno-religiositas. Menurut Fox (1999), agama merupakan salah satu aspek dari etnis bagi sebuah kelompok komunal. Mereka berbagi identitas kolektif yang khas dan bertahan lama berdasarkan sifat kebudayaan, pandangan baik-buruk (moralitas), dan kepada siapa mereka berhubungan. Agama dan etnis menjadi sifat penentu suatu kelompok untuk membedakannya dengan kelompok luar. Dengan kata lain, agama dan etnis bisa menjadi paket identitas sosial yang saling terikat dan turut mendasari terbentuknya primordialisme politik dalam sebuah masyarakat.

Makna populisme etno-religius dapat dianalisis dari dua unsur kata pembentuknya, yakni “etno-” dan “religius”. Madrid (2019) mengistilahkan etno-populisme sebagai wacana dan strategi politik yang menggabungkan daya tarik etnis dan populis. Lalu, Zúquete (2017) mengistilahkan populisme religius sebagai bentuk populisme yang melibatkan kelompok atau gerakan populis yang secara terbuka menganut penafsiran transendental dalam realitas kemanusiaan, di mana agama melegitimasi tatanan sosial, rezim, dan masyarakat politik dari kekuatan yang destruktif. Berdasarkan penjelasan tersebut, untuk mengkaji fenomena populisme di Malaysia dalam riset ini, kami mengajukan terminologi baru, yakni “populisme etno-religius” yang bisa didefinisikan sebagai sebuah varian populisme yang menggabungkan konsep etnis dan agama yang dilakukan oleh tokoh atau kelompok tertentu dengan retorika populis. Dalam konteks ini, populisme etno-religius di Malaysia ditunjukkan dengan perkawinan identitas etnis Melayu dan agama Islam.

Dalam konteks sosial-politik, Malaysia mengukuhkan peran etnis dan agama dalam kehidupan bernegara dengan mengakomodasi hak istimewa kaum Melayu-Muslim. Hasil dari prinsip ini adalah parlemen Malaysia yang didominasi oleh partai berideologi nasionalisme-konservatif dalam spektrum sayap kanan dengan kebijakan yang Melayu-Islam-sentris. Tidak hanya itu, keberadaan monarki sebagai institusi-sentral tradisional bagi Melayu-Muslim, yang mempertahankan legitimasi politik Melayu-Muslim ini, membuat hubungan antara politik praktis parlemen dengan kerajaan cenderung bersifat mutual dan melanggengkan sistem yang tidak seimbang. Konfigurasi rezim hibrida ini melahirkan pembelahan sosial dalam masyarakat Malaysia berupa politik rasial antara kaum Melayu melawan periferinya, non-Melayu (Case, 2019).

#### Karakteristik Politik Negara Malaysia

Untuk memahami populisme etno-religius di Malaysia, kita perlu memahami dua aspek yang menjadi karakteristik politik Malaysia. *Pertama*, aspek sosial-historis, adalah latar belakang Malaysia sebagai himpunan kerajaan-kerajaan Melayu-Islam dengan pemerintahan feodalistis dan segregatif yang menjadi fondasi negara Malaysia di masa kini. Feodalistis berarti Malaysia masih mempertahankan struktur masyarakat

feodal di zaman modern dengan raja-raja Melayu dan sistem politik yang dibawahnya sebagai pemegang kedaulatan yang sah. Segregatif berarti tatanan sosial-politik Malaysia memberikan demarkasi yang jelas, baik antara kelompok Melayu dan non-Melayu, maupun Muslim dengan non-Muslim, dan perkawinan antara keduanya, yang menjadi konstruksi sosial Malaysia. Kedua hal ini berhubungan erat dengan makropolitik Malaysia, seperti pengaruh legitimasi kekuasaan di sektor vital yang bersentuhan langsung dengan sistem. *Kedua*, aspek politik, adalah pengakuan kaum Bumiputera sebagai pemegang kekuatan politik sentral. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat konstitusional Malaysia yang memberi mandat bagi Yang di-Pertuan Agong untuk mempertanggungjawabkan perlindungan atas hak istimewa kaum Bumiputera. Kedudukan kaum Bumiputera ini adalah kaidah yang disengaja dan diakui undang-undang. Maka, ia bukanlah sebuah ketentuan yang harus diterima (*fait accompli*) yang terjadi karena konsesi sosial-politik di masa lampau, melainkan karena dasar negara Malaysia sejak awal memang didesain menjadi negara etnis. Politik partikularisme berupa etnosentrisme seperti ini adalah kunci dari kebijakan politik Malaysia yang bersifat diskriminatif terhadap *out-group*.

Berangkat dari dua aspek ini, populisme etno-religius di Malaysia dapat dijelaskan melalui kerangka pikir tiga elemen yang membentuk populisme etno-religius tersebut. *Pertama*, komposisi etnis, adalah penanda pembelahan sosial di Malaysia akibat hak istimewa etnis Melayu yang melahirkan politik *ethnic-centered policy*. *Kedua*, konfigurasi partai politik dan pemerintahan, adalah dinamika partai politik dan pemerintahan rezim yang memelihara legitimasi kekuasaan untuk mempertahankan kedudukan dan kestabilan politik yang diwujudkan dengan ragam kebijakan diskriminatif. *Ketiga*, revivalisme agama Islam, adalah gejala fundamentalisme Islam dan meningkatnya wacana moral agama, dilatarbelakangi oleh semangat formalisasi agama yang bersifat sektarian, sehingga meminggirkan nilai-nilai multikulturalisme dan prinsip demokrasi.

Tiga elemen dalam populisme etno-religius ini akan dijelaskan bersamaan dengan *setting* rezim hibrida di Malaysia dalam bab berikutnya. Menurut Case (2019), rezim hibrida ditandai dengan lembaga negara yang asimetris, yakni kondisi kebebasan masyarakat sipil yang dikekang, tetapi tidak sampai dihilangkan, dan pemilihan umum tetap diselenggarakan sebagai pemenuhan demokrasi, tetapi kenyataannya terdapat manipulasi yang dilakukan oleh rezim penguasa. Ia juga berpendapat bahwa dalam rezim hibrida, pemerintah cenderung akan menonjolkan kediktatoran militer atau perseorangan, tetapi secara umum lebih mungkin untuk menggunakan partai tunggal yang berkuasa dengan penuh. Situasi yang digambarkan oleh Case ini sejalan dengan konteks sejarah Malaysia yang mengalami dominasi tunggal partai politik selama bertahun-tahun.

### **Tiga Elemen Pembentuk Populisme Etno-Religius di Malaysia**

Kami berargumen bahwa populisme yang terjadi di Malaysia bukanlah sebuah gejala populisme yang melibatkan perjuangan antara rakyat melawan elite politik seperti halnya definisi populisme klasik (*small "p" populism*), melainkan persaingan ideologis antarelite partai politik untuk mempertahankan kekuasaannya menggunakan retorika populis. Argumen ketidakcocokan logika populisme ini didasari oleh prakondisi populisme yang umumnya tumbuh dalam relasi kuasa antara rakyat dan elite yang tidak seimbang. Sementara itu, Malaysia sejak awal memiliki konstitusi diskriminatif yang mengafirmasi kedudukan kaum tertentu dalam ragam akses sumber daya politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Selain itu juga, populisme di Malaysia lebih sering mengimplikasikan makna "rakyat" dan segala kepentingannya secara khusus kepada kelompok mayoritas Melayu-Muslim saja. Oleh karena itu, konteks sosial-politik yang ada di Malaysia ini membuat makna populisme klasik menjadi kurang relevan dan tidak berlaku, karena populisme yang terjadi di Malaysia cenderung mengalienasi kelompok minoritas dan liyan (*out-group*), bahkan tidak jarang ke sesama kelompok mayoritas Melayu-Muslim yang berbeda kepentingan.

Penggunaan terminologi populisme etno-religius, dalam kasus ini, menjadi hal yang tepat, karena ia menggambarkan daya tarik (*appeal*) dari diskursus populis di Malaysia yang semata merupakan instrumen untuk mempertahankan legitimasi kekuasaan mayoritas ketimbang mengadvokasikan kepentingan rakyat umum melawan elite. Lemahnya kemampuan populisme klasik dalam menjelaskan gejala populisme ini berangkat dari konteks politik segregatif di Malaysia, sebab konstruksi nasionalisme (yang sarat dengan ciri menjunjung kepentingan bersama) yang dibangun di Malaysia bersifat kabur dan paradoksikal, karena adanya tumpang tindih antara etnosentrisme kemelayuan yang primordial dengan semangat nasionalisme yang egalitarian. Hal ini menyebabkan interpretasi "rakyat" dalam populisme di Malaysia bersifat parsial. Maka, populisme klasik tidak dapat mendeskripsikan gejala populisme Malaysia sepenuhnya, tetapi ada faktor lain seperti etnis dan agama yang bermain dalam populisme ini.

Argumen ini didukung oleh Majstorovic (1997) bahwa ada ambiguitas yang signifikan dalam hubungan antara negara dengan beragam kelompok etno-nasional yang masuk di dalamnya. Artinya, pembentukan

sebuah negara dan identitas nasional yang di saat bersamaan mencampur kepentingan etno-nasional itu tidaklah *feasible*. Fenomena dualisme ini menurut Majstorovic seringkali menghasilkan konflik ideologis antara gagasan politik dari sebuah negara-bangsa dengan kenyataan sejarah dari bangsa itu sendiri. Majstorovic menekankan bahwa hanya ada sedikit negara yang berhasil membuat negara dan bangsa menjadi kongruen. Artinya, dualisme elemen yang bertolak belakang tersebut, yakni etnosentrisme dan nasionalisme, adalah akar dari varian populisme etno-religius di Malaysia. Dalam konteks politik Malaysia, etnosentrisme mendorong timbulnya paradigma atau doktrin bahwa etnis Melayu memiliki legitimasi sah dalam mendominasi kekuasaan politik berdasarkan klaim sebagai “bangsa asli” di teritori Malaysia. Lalu, Islam sebagai penentu identitas kemelayuan seseorang membuat konstruksi sosial perkauman di Malaysia menjadi kaku dan sempit. Identitas integral Melayu-Islam ini kemudian mempengaruhi kebijakan politik Malaysia yang diskriminatif akibat pengotakan kelompok *in-group vs out-group*.

Komposisi etnis Malaysia yang relatif majemuk membuatnya sulit untuk membedakan mana “rakyat” yang dimaksud (Azhari & Halim, 2019). Berdasarkan data statistik kependudukan Malaysia, utamanya di wilayah Semenanjung, total populasi orang Melayu adalah 63,1%, diikuti orang Tionghoa sebesar 24,6%, orang India sebesar 7,3%, dan lainnya 5%; sementara dalam komposisi agama, mayoritas warga negara Malaysia menganut agama Islam dengan jumlah 63%, disusul dengan agama Buddha 21%, agama Kristen 10%, dan agama Hindu 6% (Halim & Azhari, 2021). Ketika politisi populis, yang mayoritasnya berlatar belakang Melayu-Islam, acapkali menafikan kelompok non-Melayu-Islam, konstruksi makna rakyat yang dibangun dalam wacana populis mereka menjadi inkongruen akibat sikap kerakyatan yang tebang pilih. Sikap tebang pilih ini adalah cerminan dari bermasalahnya prinsip politik Ketuanan Melayu dalam menyikapi pemakaian kerakyatan dan hubungan antara etnis dan agama dengan identitas seseorang.

Ketuanan Melayu adalah ideologi yang menghendaki supremasi etnis Melayu dalam segala aspek di Malaysia, utamanya adalah urusan politik (Chin, 2021). Walaupun merupakan negara demokrasi, konstitusi Malaysia menjunjung hak istimewa Melayu sehingga etnisitas memainkan peranan signifikan dalam dinamika politik Malaysia. Tindakan afirmasi ini juga diperkuat dengan diberlakukannya kebijakan etnosentris, seperti *New Economic Policy* (NEP) yang mewajibkan kuota 30% bagi kaum Bumiputera dalam bidang bisnis, pemerintahan, dan pendidikan sehingga membuat orang non-Melayu terpinggirkan dalam jabatan publik (Chin, 2015). Kebijakan NEP ini dibentuk untuk memenuhi mandat konstitusi yang menghendaki kedudukan etnis Melayu dalam jabatan pelayanan publik dengan tujuan untuk menciptakan ekuilibrium status sosial dan ekonomi antaretnis di Malaysia yang sebelumnya timpang karena hasil kolonialisme Inggris. Berdasarkan data Center for Public Policy Studies (CPPS) dalam Chin (2015), angka pemegang jabatan pelayanan publik di Malaysia didominasi oleh etnis Melayu dengan pertumbuhan dari angka 60% ke 77% sejak NEP berlaku; lalu, dalam bidang jabatan di Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik (PTD) jumlahnya mencapai 85% Melayu atau 6:1 antara Melayu dan non-Melayu.

Kentalnya etnisitas dalam kebijakan politik di Malaysia adalah dampak dari perlembagaan negara Malaysia yang rasialis. Etnis non-Melayu di Malaysia dianggap sebagai *outsider* atau kaum pendatang (Mauzy, 1993). Tidak jarang anggapan ini dimaknai sebagai bentuk perbedaan yang melahirkan perselisihan dan persaingan antaretnis. Maka, untuk melindungi etnis Melayu dari risiko persaingan imigran yang makin kuat, dibentuklah kesepakatan antara pemerintah kolonial dengan bangsawan Melayu untuk memberi hak-hak istimewa Melayu dalam jabatan politik di pemerintahan, pendidikan, dan agraria. Fakta historis ini menunjukkan bahwa ide etno-nasionalisme yang dipelihara oleh elite, baik secara informal lewat masyarakat atau formal lewat undang-undang, tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang dianut Malaysia. Perkembangan populisme etno-religius di Malaysia justru memperlebar jurang pembelahan sosial antara Melayu dengan non-Melayu. Karakteristik ini membatalkan prasyarat demokrasi yang menitikberatkan kepentingan bersama yang inklusif dan universal ketimbang menonjolkan kepentingan golongan.

Pada konfigurasi partai politik dan pemerintahan, interaksi negatif kedua entitas kekuasaan ini menyebabkan situasi politik di Malaysia menjadi nondemokratis. Iklim nondemokratis ini membuat Malaysia dicap sebagai *competitive authoritarianism* akibat sistem partai dominan tunggal di Malaysia. Hal ini dimaknai dengan adanya prosedur pemilihan berkala yang digelar dalam mekanisme partai banyak, tetapi sekadar bersifat formalitas saja. Walau dengan ini partai dominan tunggal suatu waktu bisa saja kehilangan basis suara, asas tersebut harus tetap berjalan agar Malaysia tetap bisa memenuhi prasyarat demokrasi sekaligus menjaga legitimasi politik yang dimiliki oleh partai dominan tersebut supaya tetap bertahan (Gomez, 2016). Partai dominan yang dimaksud dalam konteks ini adalah partai United Malays National Organisation (UMNO). Untuk memahami bab ini, kita dapat menganalisis situasi partisan Malaysia berupa dominasi UMNO.

UMNO memegang kuasa pemerintahan di Malaysia selama lebih dari 60 tahun. UMNO merupakan partai basis pendukung ideologi etnonasionalis Ketuanan Melayu. Pergerakan politik UMNO ditandai dengan kebijakan kanan yang memanfaatkan isu rasialisme untuk memperoleh simpati masyarakat, khususnya pada

domain vital, seperti kontrol identitas nasional atas bahasa, budaya, agama, hingga persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi dan sosial. Selain itu, UMNO juga mendirikan koalisi pemerintahan Barisan Nasional (BN) yang mendesain politik nasional untuk memelihara *status quo* mereka sebagai partai penguasa di parlemen dengan tiga metode, yakni: (1) jangkauan modal, uang, dan media yang memudahkan elemen partai untuk memenangi kursi atau menjabat di koalisi; (2) dominasi partai UMNO di koalisi pemerintah; dan (3) keluwesan UMNO dalam memasukkan anggota baru ke dalam koalisinya (Ming, 2018).

Gaya pemerintahan UMNO yang cenderung berperan sebagai garda kaum Melayu juga terkadang berjalan tandem dengan pemanfaatan narasi agama Islam yang menjadi identitas inti Melayu. Hubungan antara partai politik dan pemerintahan dalam mempertahankan legitimasi kekuasaan dengan corak pemerintahan seperti ini yang mendorong bibit populisme etno-religius. Tren populisme etno-religius di Malaysia baru muncul setelah periode krisis finansial Asia pada tahun 1997 ketika Malaysia mulai mengalami gejolak politik karena korupsi di tubuh UMNO dan gerakan reformasi yang muncul pada tahun 1990-an hingga kini, utamanya dari kelompok oposisi berupa partai progresif-reformis dan Islamis konservatif yang menuntut liberalisasi politik dan penghentian dominasi UMNO. Kelompok oposisi ini juga ada yang menuntut pluralisme dan kesetaraan bagi seluruh etnis dan agama, yang bertentangan dengan ideologi arus utama UMNO yang menghendaki terpeliharanya hak istimewa bagi kaum mayoritas Melayu-Muslim.

Kegoyahan legitimasi UMNO dimulai sejak menonjolnya sosok Anwar Ibrahim sebagai figur gerakan reformasi, yang kemudian mengilhami berdirinya koalisi Barisan Alternatif. Koalisi ini terdiri dari partai oposisi seperti Partai Islam se-Malaysia (PAS), Partai Keadilan Rakyat (PKR), dan Democratic Action Party (DAP), serta aktivis reformasi dan kaum multietnis. Pada Pemilu 1999, koalisi BN kalah telak di beberapa negara bagian, seperti Kelantan dan Terengganu (Gomez, 2016). Jatuhnya basis suara UMNO ini membangkitkan penggunaan daya tarik (*appeal*) populisme etno-religius oleh UMNO untuk mempertahankan kekuasaan mereka di pemerintahan. Dettman (2020) dalam risetnya menghimpun data mengenai tren perolehan kursi UMNO dan perolehan kursi-suara koalisi BN pada Pemilu 1999—2018. Pada Pemilu 1999 silam, UMNO memulai dengan perolehan kursi yang relatif stagnan pada angka di kisaran 30% lebih. Tren tersebut kemudian menunjukkan kenaikan pesat di Pemilu 2004 dengan kemenangan *landslide* UMNO dan koalisi BN, sekaligus menjadi pemilihan pertama era Abdullah Ahmad Badawi sejak ia menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 2003 lalu. Kendati demikian, kenaikan dukungan publik terhadap UMNO-BN pada Pemilu 2004 tersebut lantas hanya terjadi sekali saja dan setelahnya justru menunjukkan tren penurunan yang signifikan pada Pemilihan tahun 2008, 2013, dan 2018.

Tren ini dapat diinterpretasikan dengan memahami konteks politik yang terjadi di masa itu. Kemenangan UMNO dan koalisi BN pada 2004 adalah momentum dari menguatnya sentimen etnis dan agama antara kelompok rezim lama etnonasionalis Melayu (UMNO) dan oposisi Islamis konservatif (PAS). Sebagai latar belakang, debat mengenai Islamisasi dalam politik arus utama Malaysia sejak dahulu selalu diungguli oleh PAS, sehingga UMNO pasca-Mahathir melakukan sikap yang lebih berani dalam diskursus politik agama Malaysia. Kemenangan UMNO-BN tahun 2004 merupakan keberhasilan mereka dalam merestorasi citra politik di parlemen seiring dengan masuknya Badawi untuk melawan daya tarik oposisi PAS. Pun demikian, kemenangan itu tidak terjadi tanpa suatu sebab. Melalui Liow (2005), kita dapat menyimpulkan bahwa ada tiga taktik yang dimanfaatkan UMNO lewat Badawi untuk melawan PAS, yang nantinya berpengaruh pada kemenangan mereka di Pemilu 2004. *Pertama*, penolakan terhadap rencana PAS untuk mendirikan negara Islam di Malaysia. *Kedua*, pembuktian bahwa nilai-nilai Islam memang telah tertanam di dalam pemerintahan. *Ketiga*, Badawi memanfaatkan citra keislaman dengan memimpin doa dalam acara publik, seperti di pembukaan rapat atau iftar Ramadan. Gestur simbolis ini adalah cara UMNO dalam menantang oposisi dengan cara memperkuat pengaruh agama di politik formal.

Kebangkitan partai oposisi yang mengadvokasikan reformasi pun menjadi katalis populisme etno-religius. UMNO kehilangan akuntabilitasnya secara drastis dengan terseretnya elite politik mereka dalam skandal besar, seperti korupsi, pencucian uang, dan penggelapan uang. Momentum keruntuhan tersebut terjadi ketika kasus korupsi besar 1-Malaysia Development Berhad (1MDB) oleh Perdana Menteri Najib Razak terkuak pada tahun 2015. Kasus skandal ini dimanfaatkan oleh koalisi Pakatan Harapan (PH) untuk menarik kembali kepercayaan publik yang sebelumnya pupus akibat propaganda UMNO. PH adalah koalisi oposisi yang terdiri dari kelompok partai berideologi progresif, kiri-tengah, dan kaum minoritas. Akibat skandal politik Razak tersebut, PH merebut narasi pertahanan kedaulatan rasial kaum Melayu-Muslim terhadap ancaman luar dari Tiongkok sekaligus melenyapkan narasi minoritas Tionghoa sebagai ancaman internal, yang selama ini digaungkan oleh UMNO (Wong & Ooi, 2018). Taktik pembingkai ulang narasi oleh PH ini praktis menarik simpati dua kelompok bersamaan, yakni mayoritas Melayu dan minoritas Tionghoa, tanpa harus membuat PH mengalienasi dan membuat ketegangan antarkaum.

Sebagai konsesi atas kekalahan UMNO di beberapa negara bagian, UMNO kemudian menciptakan koalisi baru dengan PAS untuk menandingi koalisi PH sebagai rival bersamanya. Koalisi baru bernama Muafakat Nasional itu berdiri pada tahun 2019 dan membawa isu lenyapnya kedudukan politik Melayu. Mereka mengeklaim bahwa hak istimewa Melayu direnggut dengan berkuasanya koalisi PH di pemerintahan. Klaim ini muncul karena saat koalisi PH berkuasa sejak kemenangannya di Pemilu 2018, mereka melahirkan kebijakan-kebijakan yang menurut UMNO merugikan etnis Melayu, seperti kebijakan antirasialisme dan pengangkatan pejabat non-Melayu di sektor strategis (Ostwald, 2020). Gejolak ini adalah indikasi dari ketidakstabilan organ partai UMNO dan orientasi politik yang dianut partai dalam menghadapi kontestasi politik Malaysia yang kian kompetitif. Mitigasi yang dilakukan UMNO untuk memulihkan legitimasi politiknya dengan menggunakan populisme etno-religius justru membahayakan iklim demokrasi Malaysia.

Kemudian, dalam revivalisme agama Islam, Malaysia mengalami dilema moralitas karena memiliki konflik kepentingan antara identitas kemelayuan dan prinsip demokrasi. Secara luas, agama menjadi faktor utama yang menentukan kebijakan publik dan wacana sosial-politik yang berkembang di Malaysia. Berbeda dengan negara-negara lain yang memiliki sikap/ Pernyataan yang jelas mengenai hubungan antara agama dan negara, Malaysia masih terjebak dalam hal tersebut. Ditambah dengan situasi multikulturalisme, sikap dan kebijakan yang radikal membuat topik hubungan agama dan negara menjadi sensitif. Kelompok progresif menolak inkorporasi nilai Islam berlebihan yang berpotensi melukai demokrasi dan pluralisme, sedangkan kelompok Islamis konservatif (yang kadang juga beririsan dengan kelompok etnonasionalis Melayu) vokal dalam mendukung formalisasi agama. Argumen yang sering diangkat oleh kelompok yang terakhir adalah interpretasi dari konstitusi Malaysia Pasal 3 Ayat (1) bahwa Islam adalah agama resmi Malaysia (Hoffstaedter, 2013). Sebelumnya, *status quo* agama dan negara di Malaysia hanya berhenti pada pernyataan Islam sebagai agama resmi negara (*state religion*). Namun, revivalisme agama Islam mengakibatkan kelompok Islamis konservatif menginginkan teokrasi (*religious state*).

Menurut Osman (2017), revivalisme agama Islam tumbuh seiring meningkatnya resurgensi Islam sedunia. Gerakan ini tumbuh dari kelompok mahasiswa dan dakwah. Hal ini dimanfaatkan oleh Mahathir Mohamad, mantan perdana menteri dan politisi berlatar belakang Melayu-Muslim, dengan mengooptasi kelompok tersebut ke UMNO dan memelihara pengaruh agama Islam lewat program Islamisasi. Berangkat dari sini, revivalisme agama Islam adalah *critical juncture* yang menandai amalgamasi etnis dan agama dalam populisme etno-religius di Malaysia. Amalgamasi tersebut adalah konsekuensi dari kebijakan UMNO yang pro terhadap penguatan agama dan memperkuat wacana Melayu-Muslim sebagai pemegang legitimasi kekuasaan dominan yang sah.

Revivalisme agama Islam berkembang dengan meningkatnya tuntutan integrasi Islam dalam politik nasional. Menurut Olivier (2020), fenomena Islamisasi ini diagendakan oleh UMNO-PAS dan beragam lembaga swadaya masyarakat pendukungnya. Sejak UMNO-PAS kalah pemilu dan menjadi oposisi, mereka menggunakan retorika Islam sebagai alat politik dan menuduh koalisi pemerintah “tak berkeislaman” dan mempertanyakan pemenuhan nilai Islam mereka. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan suara elektoral mereka yang kian tergerus. Olivier menambahkan bahwa sekalipun UMNO-PAS kembali berkuasa dalam koalisi pemerintah, kemungkinan besar agenda tersebut akan tetap didorong sehingga menunjukkan bahwa penggunaan retorika agama Islam dalam populisme etno-religius ini semata-mata merupakan alat daya tarik (*appeal*) untuk meningkatkan suara elektoral mereka. Olivier memandang bahwa gejala ini adalah tanda atas kecenderungan Malaysia menjadi negara Islam yang kian konservatif. Tren ini dapat direfleksikan dengan mencermati sentimen etnis dan agama dari publik Malaysia dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan jajak pendapat Merdeka Center tahun 2015 dalam forum politik ras di Malaysia, hanya 44% responden yang mengidentifikasi diri dengan identitas kebangsaan Malaysia. Ibrahim Suffian, direktur program Merdeka Center, memerinci bahwa 60% responden Melayu cenderung mengidentifikasi diri sebagai Muslim dan hanya 27% responden Melayu yang mengidentifikasi diri sebagai warga negara Malaysia (Zurairi, 2015). Meningkatnya identitas agama ini menurut Suffian adalah dampak dari partai politik berbasis ras yang kian mengangkat kepentingan agama.

### **Relasi Antara Rezim Hibrida dan Populisme Etno-Religius di Malaysia**

Lynn dalam Riaz (2019) mendefinisikan rezim hibrida (*hybrid regime*) sebagai “jalan tengah yang bercampur-campur”, yakni situasi ketika sebuah rezim memungkinkan untuk mengadopsi demokrasi yang terkonsolidasi, tetapi di waktu bersamaan mengadopsi tindakan otoritarianisme. Rezim hibrida adalah fitur utama dalam struktur politik Malaysia. Akses untuk sumber daya politik memang bersifat terbuka, tetapi ada aturan-aturan konstitusional yang nondemokratis. Hal ini membuat Malaysia diidentifikasi sebagai negara demokrasi bercorak *hybrid regime* sejak dahulu akibat dominasi UMNO dengan kebijakan Ketuanan Melayu dan praktik otoritarianisme.

Menurut teori pemetaan rezim hibrida oleh Wigell (2008), Malaysia masuk ke dalam tipologi negara dengan rezim oligarki-konstitusional. Tipologi ini menunjukkan bahwa atribut konstitusi hadir dalam lembaga negara sebagai wujud pemenuhan asas demokrasi, begitu pula prasyarat lainnya ditentukan dalam konstitusi itu, tetapi negara tersebut justru masih belum memenuhi ambang batas minimal elektoral yang seharusnya. Implikasi dari pernyataan ini adalah, sebuah negara berdaulat mungkin saja menjamin kebebasan dan hak dasar warga negara sebagaimana asas demokrasi mempersyaratkannya, tetapi dalam praktiknya, sistem elektoral negara tersebut belum mengakomodasi dan merepresentasikan rakyatnya dengan adil dan terbuka. Bentuk rezim ini menurut Wigell mirip dengan negara-negara Eropa akhir abad ke-19, negara-negara Amerika Latin, dan Singapura. Meski rezim hibrida hadir di Malaysia dan elite politik rata-rata merupakan mayoritas Melayu-Muslim, yang kedudukannya kuat dan dijamin konstitusi, kompetisi elektoral antarelite membuat populisme etno-religius justru tumbuh subur di ekosistem politik Malaysia.

Populisme jenis ini dimanfaatkan politisi populis untuk mendapatkan dukungan populer dan mempertahankan legitimasi kekuasaan di tengah meningkatnya keterbukaan politik, khususnya ketika Malaysia mulai mengalami transisi dari demokrasi prosedural ke demokrasi substansial, meski masih terkungkung di dalam rezim hibrida (Mohamad Shukri & Smajljaj, 2020). Ciri rezim hibrida di Malaysia ini tidak terlepas dari pengaruh UMNO dan kekuasaannya. UMNO berdiri sebagai partai politik yang berlandaskan etnis. Konsituen mereka rata-rata adalah etnis Melayu berpaham etnonasionalisme dan Ketuanan Melayu. Corak partai etnosentris ini sejatinya tidak lazim di dunia, khususnya pada era modern. Sebab, partai politik di negara demokrasi pada zaman ini jarang yang secara eksplisit mendasarkan diri pada kepentingan berbasis etnis, tetapi lebih didasari ragam ideologi atau semangat politik universal. Keberadaan partai etnosentris ini menjadi indikator utama atas kecacatan sistem demokrasi di Malaysia, yakni suatu negara memiliki perangkat demokrasi, tetapi realitasnya praktik itu mengingkari falsafah demokrasi.

Di Malaysia, batasan antara hak dan kewajiban partai politik tidak begitu dihargai sehingga menjadi kabur. Hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan UMNO dalam hal kontrak kenegaraan, pinjaman, dan aset pribadi yang sejatinya bukan kewenangan partai politik, melainkan lembaga negara yang berwenang (Case, 2005). UMNO sebagai partai dominan memiliki akses sumber daya yang besar dan menjadi modal bagi mereka untuk membentuk imperium kepartaian. Hal ini membuat keberadaan oposisi menjadi tersingkirkan di arena politik nasional, karena sektor-sektor vital yang menjadi modal kekuasaan di pemerintahan telah telanjur dimonopoli oleh rezim. Meskipun demikian, praktik seperti ini masih berjalan paralel dengan kerangka demokrasi parlementer Malaysia yang sarat akan persaingan antarpolitical politik. Dengan dinamika politik yang bersifat nondemokratis, ditambah dengan kuatnya kedudukan elite politik yang merupakan kelompok mayoritas, keberadaan rezim hibrida di Malaysia ini menjadi tak terelakkan.

### **Populisme Etno-Religius dan Kemunduran Demokrasi**

Populisme etno-religius di Malaysia merupakan fenomena yang relatif baru, karena muncul dalam beberapa tahun dekade terakhir, beriringan dengan tren reformasi dan menurunnya legitimasi UMNO. Menurut Munro-Kua (1996), agama Islam menjadi salah satu unsur dari populisme Malaysia saat kepemimpinan Mahathir Mohamad akibat perubahan sosial, ekonomi, dan politik yang cepat sejak tahun 1980-an. Titik waktu ini mengalami kulminasi pada krisis finansial Asia 1997 yang menyertai tren gelombang demokratisasi negara-negara berkembang di seluruh dunia dan berlanjut hingga sekarang sebagai gerakan reformasi atas rezim otoriter UMNO. Momentum seperti ini membuat Malaysia ikut terseret dalam tren demokratisasi dunia, seiring dengan goyahnya *ancien régime* yang selama ini dikuasai oleh dominasi partai UMNO.

Dengan meningkatnya dinamika politik seiring dengan berkurangnya dominasi UMNO, populisme etno-religius berhasil mengisi politik arus utama Malaysia. Dalam Manifesto Pakatan Harapan pada Pemilu ke-14 yang bertajuk *Buku Harapan*, PH mengkritisi UMNO yang dianggap menipu rakyat dengan politik rasial yang digunakan untuk menjaga kekuasaan elite politik (Azhari & Halim, 2019). Kebangkitan pesaing UMNO turut memantik populisme etno-religius untuk merebut konstituen. Kekuatan alternatif seperti koalisi Perikatan Nasional (PN), yang terdiri atas Partai Persatuan Bumiputera Malaysia (PPBM) dan Partai Islam se-Malaysia (PAS), memanfaatkan momentum ini untuk mendorong kebijakan konservatif (Shukri, 2021). Lantas, tindakan tarik ulur politik agama seperti ini menjadi alat umum elite partai politik dalam menarik pendukung melalui narasi populis. Perkembangan populisme etno-religius di Malaysia ini adalah upaya UMNO dalam memenangkan simpati dan suara elektoral setelah dominasi mereka runtuh akibat kegoyahan partai, ketidakpuasan konstituen, dan kenaikan daya tarik oposisi. Secara tidak langsung, kompetisi elektoral yang tidak sehat ini merusak kelangsungan demokrasi Malaysia.

V-Dem Institute menempatkan Malaysia ke dalam golongan *Electoral Autocracy* (Boese & Lindberg, 2022). Golongan ini menurut Maerz et al. (2020) ditandai dengan adanya pemilu multipartai, tetapi dinamika politik cenderung mengikuti kehendak petahana saja sampai ke tahap di mana ia tidak bisa dikatakan

demokratis lagi. Hal ini umumnya dilakukan dengan pembatasan media dan masyarakat sipil serta represi oposisi. V-Dem Institute juga melaporkan bahwa Malaysia berada di posisi ke-35 dalam kelompok negara *Electoral Autocracy* tersebut, yakni setingkat di atas Mauritania dan di bawah Madagaskar, sebuah posisi yang relatif ironis untuk ukuran negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Laporan ini mengindikasikan bahwa populisme etno-religius, dan segala bentuk kebijakan nondemokratis yang dihasilkan oleh politisi yang populis tersebut, berpengaruh terhadap menurunnya fungsi dan mutu demokrasi di Malaysia secara signifikan.

#### 4. Kesimpulan

Temuan artikel ini adalah gejala populisme yang terjadi di Malaysia bukanlah populisme seperti yang didefinisikan oleh populisme klasik (*small "p" populism*) yang lebih menekankan pertarungan antara rakyat melawan elite. Namun, setelah menganalisis tiga elemen yang menjadi bingkai penelitian, yakni komposisi etnis, konfigurasi partai politik dan pemerintahan, dan revivalisme agama Islam, dapat disimpulkan bahwa gejala populisme di Malaysia cenderung bersifat persaingan ideologis elite partai politik antara kelompok etnonasionalis Melayu, Islamis konservatif, dan progresif-reformis. Mengingat sifat populisme yang bukan merupakan *thick ideology* sehingga penafsirannya tidak bersifat kaku, maka boleh disepakati bahwa populisme etno-religius di Malaysia tetap diakui sebagai subset dari populisme karena ada kecenderungan elite partai untuk membawa nama "rakyat" sebagai retorikanya, walau realitasnya menunjukkan sifat tebang pilih dengan adanya alienasi kelompok minoritas dan liyan (*out-group*) di ruang politik.

#### Daftar Pustaka

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.
- Azhari, A., & Halim, F. A. (2019). The Changing Nature of Populism in Malaysia. Dalam *Working Papers Series: Populism in Asia 4* (Working Papers Series: Populism in Asia 4).
- Boese, V. A., & Lindberg, S. I. (2022). *Democracy Report 2022: Autocratization Changing Nature?*
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Case, W. (2005). Southeast Asia's Hybrid Regimes: When Do Voters Change Them? *Journal of East Asian Studies*, 5(2), 215–237.
- Case, W. (2019). Politics in Malaysia Today-Demise of the Hybrid? *Taiwan Journal of Democracy*, 15(2), 1–29.
- Chin, J. (2015). Pseudo-democracy and the Making of a Malay-Islamic State. Dalam W. Case (Ed.), *Routledge Handbook of Southeast Asian Democratization* (hlm. 399–409). Routledge.
- Chin, J. (2021). Malaysia: Identity Politics, the Rise of Political Islam and Ketuanan Melayu Islam. Dalam M. Mathews & M. Tay (Ed.), *Religion and Identity Politics: Global Trends and Local Realities* (hlm. 75–95). World Scientific.
- Dettman, S. (2020). Authoritarian Innovations and Democratic Reform in the "New Malaysia." *Democratization*, 27(6), 1037–1052.
- Fox, J. (1999). Towards a Dynamic Theory of Ethno-religious Conflict. *Nations and Nationalism*, 5(4), 431–463.
- Freedom House. (2022). *Freedom in the World 2022 Malaysia*.
- Gomez, E. T. (2016). Resisting the Fall: The Single Dominant Party, Policies and Elections in Malaysia. *Journal of Contemporary Asia*, 46(4), 570–590.
- Hadiz, V. R., & Chryssogelos, A. (2017). Populism in World Politics: A Comparative Cross-regional Perspective. *International Political Science Review*, 38(4), 399–411.
- Halim, F. A., & Azhari, A. (2021). The Changing Nature of Populism in Malaysia. Dalam S. J. Lee, C. Wu, & K. K. Bandyopadhyay (Ed.), *Populism in Asian Democracies: Features, Structures, and Impacts*. Brill.
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Pustaka Ilmu.
- Hera, A. E. (2017). Populism in Indonesia and its Threats to Democracy. *Third International Conference on Social and Political Sciences (ICSPS 2017)*, 106–111.
- Hoffstaedter, G. (2013). Secular State, Religious Lives: Islam and the State in Malaysia. *Asian Ethnicity*, 14(4), 475–489.
- Lee, R. L. M. (1990). The State, Religious Nationalism, and Ethnic Rationalization in Malaysia. *Ethnic and Racial Studies*, 13(4), 482–502.

- Lee, S. J., Wu, C., & Bandyopadhyay, K. K. (2021). Introduction: Populism in Asian Democracies. Dalam S. J. Lee, C. Wu, & K. K. Bandyopadhyay (Ed.), *Populism in Asian Democracies: Features, Structures, and Impacts*. Brill.
- Liow, J. (2005). The Politics Behind Malaysia's Eleventh General Election. *Asian Survey*, 45(6), 907–930.
- Madrid, R. L. (2019). The Emergence of Ethno-populism in Latin America. Dalam C. De la Torre (Ed.), *Routledge Handbook of Global Populism* (hlm. 163–175). Routledge.
- Maerz, S. F., Lührmann, A., Hellmeier, S., Grahn, S., & Lindberg, S. I. (2020). State of the World 2019: Autocratization Surges – Resistance Grows. *Democratization*, 27(6), 1–19.
- Magno, F. A. (2021). Contemporary Populism and Democratic Challenges in the Philippines. Dalam S. J. Lee, C. Wu, & K. K. Bandyopadhyay (Ed.), *Populism in Asian Democracies* (hlm. 61–79). Brill.
- Majstorovic, S. (1997). The Politics of Ethnicity and Post-Cold War Malaysia: the Dynamics of an Ethnic State. Dalam M. T. Berger & D. A. Borner (Ed.), *The Rise of East Asia: Critical Visions of the Pacific Century* (hlm. 148–168). Routledge.
- Mauzy, D. (1993). Malay Political Hegemony and 'Coercive Consociationalism.' Dalam J. McGarry & B. O'Leary (Ed.), *The Politics of Ethnic Conflict Regulation* (hlm. 118–138). Routledge.
- Ming, O. K. (2018). Malaysian Political Parties and Coalitions. Dalam M. L. Weiss (Ed.), *Routledge Handbook of Contemporary Malaysia* (hlm. 22–35). Routledge.
- Mohamad Shukri, S. F., & Smajljaj, A. (2020). Populism and Muslim Democracies. *Asian Politics & Policy*, 12(4), 1–17.
- Mudde, C. (2004). The Populist Zeitgeist. *Government & Opposition*, 39(4), 541–563.
- Munro-Kua, A. (1996). *Authoritarian Populism in Malaysia*. Palgrave Macmillan.
- Olivier, B. (2020). *Islamic Revivalism and Politics in Malaysia: Problems in Nation Building*. Palgrave Macmillan.
- Osman, M. N. M. (2017). The Islamic Conservative Turn in Malaysia: Impact and Future Trajectories. *Contemporary Islam*, 11(1), 1–20.
- Ostwald, K. (2020). Malaysia 2020: The Impasse of Two-Coalition Politics. *Perspective*, 25, 1–8.
- Riaz, A. (2019). What Is a Hybrid Regime? Dalam *Voting in a Hybrid Regime: Explaining the 2018 Bangladeshi Election*. Palgrave Pivot Singapore.
- Shukri, S. (2021, Juli 5). *Malay Political Polarization and Islamic Populism in Malaysia*. Stratsea. <https://stratsea.com/malay-political-polarization-and-islamic-populism-in-malaysia/>
- Shukri, S. (2023). In Limbo: Islamist Populism and Democratic Stagnation in Malaysia. Dalam J. Ockey & N. S. Talib (Ed.), *Democratic Recession, Autocratization, and Democratic Backlash in Southeast Asia* (hlm. 93–115). Palgrave Macmillan.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Weiss, M. L. (2020). The Limits of "Populism": How Malaysia Misses the Mark and Why That Matters. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 39(2), 207–226.
- Wigell, M. (2008). Mapping "Hybrid Regimes": Regime Types and Concepts in Comparative Politics. *Democratization*, 15(2), 230–250.
- Wong, C. H., & Ooi, K. B. (2018). Introduction: How Did Malaysia End UMNO's 61 Years of One-Party Rule What's Next? *The Round Table*, 107(6), 661–667.
- Yilmaz, I., & Morieson, N. (2022). Religious Populisms in the Asia Pacific. *Religions*, 13(9), 1–18.
- Zúquete, J. P. (2017). Populism and Religion. Dalam C. R. Kaltwasser, P. Taggart, P. O. Espejo, & P. Ostiguy (Ed.), *The Oxford Handbook of Populism* (hlm. 445–466). Oxford University Press.
- Zurairi, A. R. (2015, Agustus 10). *More Malays see Selves as Muslims First, Pollster Says*. Malaymail. <https://www.malaymail.com/news/malaysia/2015/08/10/more-malays-see-selves-as-muslims-first-pollster-says/949321>